



HERI SUSANTO/JOGLO JOGJA

EVALUASI: Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta RM Sinarbiyat Nujanat mencermati pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.

Lampu Merah Keuangan Pemkot

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Lampu merah untuk keuangan APBD Pemkot Yogyakarta. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu pajak hotel restoran berpeluang merosot.

Padahal, pajak hotel dan restoran ini menyokong 34,4 persen terhadap pajak daerah. Atau, 23,4 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

"Kota Yogya ini, penyumbang PAD terbesar dari pajak hotel dan restoran, ya. Saya kira ini betul-betul harus menjadi PR bagi Pemkot Yogya *kan, ya*," kata Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta RM Sinarbiyat Nujanat dihubungi wartawan, Selasa (8/4/2025).

Sinar menjelaskan, sebenarnya saat ini sudah menjadi

lampu merah untuk keuangan daerah di Kota Yogyakarta. Sebab, dengan penurunan omzet pariwisata di Kota Yogyakarta otomatis berdampak serius terhadap PAD.

"Saya kira ini ini perlu untuk kemudian kita kaji secara bersama-sama. Kita evaluasi secara bersama-sama dan juga Pemerintah Kota Yogyakarta.

■ Baca **LAMPU...** Hal II

Lampu Merah Keuangan Pemkot

sambungan dari hal Joglo Jogja

Saya kira perlu duduk bersama juga dengan para *stakeholder*, untuk melakukan diskusi-diskusi untuk bagaimana mencari solusi ke depan, ya," jelasnya.

Dengan struktur APBD Kota Yogyakarta, lanjut Sinar, pajak hotel dan restoran masih menjadi sumber utama dari PAD di Kota Yogyakarta. Tahun 2024 silam, pajak dari hotel dan restoran terealisasi lebih dari Rp 210 miliar. Sedangkan pajak restoran lebih dari Rp 86 miliar. Jumlah

pajak hotel dan restoran itu mencapai 34,3 persen dari pendapatan asli daerah.

Sinar menegaskan, jumlah tersebut lebih dari seperempat APBD Kota Yogyakarta tahun 2025 yang diproyeksikan Rp 2,2 triliun. Makanya, dia berharap ada kreativitas Pemkot Yogyakarta untuk mengoptimalkan promosi.

"Masih banyak potensi-potensi yang sebetulnya bisa ditingkatkan. Untuk untuk meraih PAD yang lebih besar lagi *kan*. Jangan sampai

kemudian Pemerintah Kota Yogya ini hanya selalu pasang target itu, pasang target yang itu sudah pasti tercapai. *Kan gitu*," terangnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Eryono Pranowo mengeluhkan adanya penurunan okupansi hotel di Kota Yogyakarta. Termasuk, lama tinggal wisatawan selama libur Lebaran.

"Rata-rata okupansi hotel pada periode 28 Maret hingga 1 April 2025 hanya mencapai 30-50 persen.

Naik menjadi 80 persen pada tanggal 2-4 April. Turun lagi pada tanggal 5-7 April sekitar 60 persen," katanya.

Penurunan okupansi hotel ini, lanjut Deddy, otomatis berdampak terhadap pajak hotel dan restoran. Tak hanya internal karyawan dan keberlangsungan hidup hotel saja.

"Ya, otomatis. Sudah sejak awal tahun ini, ada penurunan okupansi. Apalagi, MICE (*meeting, incentive, convention, dan exhibition*) dilarang pemerintah, " imbuhnya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005